BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produktivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan KPU yang masih menimbulkan multitafsir dan sumber dana yang dimiliki KPU saat melakukan verifikasi sangat terbatas.
2. Kualitas layanan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 sudah cukup berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari kualitas SDM dan pemberian informasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 belum cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang responsifnya para *stakeholders* dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan dan kurangnya tanggapan masyarakat pada hasil verifikasi yang dilakukan KPU.
4. Responsibilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 telah cukup maksimal dalam mengimplementasikan standar-standar program dari kegiatan verifikasi.

Hal ini dapat dilihat dari adanya tanggung jawab serta terciptanya kerjasama dengan para *stakeholders* terkait masalah verifikasi, telah memudahkan KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terdapat data persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Produktivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 seharusnya membuat aturan mengenai pencalonan dan verifikasi, diantaranya meminta masukan dari instansi-instansi lain seperti Departemen Pendidikan, Kepolisian, MA, MK, dan lain-lain. Sehingga persiapan awal berupa aturan-aturan mengenai masalah teknis verifikasi menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
2. Kualitas layanan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 membentuk Tim Verifikasi yang bertugas di lapangan untuk menanggapi permasalahan teknis di lapangan dan menguji kebenaran data dari berkas yang diserahkan oleh calon anggota DPRD kepada KPU.

3. Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 harus lebih cepat tanggap dalam menerima masukan-masukan terkait masalah verifikasi calon anggota DPRD, dan juga mampu merespon keinginan dari para *stakeholders* serta masukan dari masyarakat.
4. Responsibilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 harus dapat lebih melakukan komunikasi dan kerjasama bukan hanya dari *stakeholders* yang berkepentingan, tetapi juga dari pihak lain sebagai referensi KPU dalam menerima masukan-masukan dan melaksanakan tanggung jawab.
5. Akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 harus membuat peraturan yang jelas untuk mendukung otoritas KPU sebagai peyelenggara Pemilu, berupa sanksi dan tindakan yang tegas apabila calon anggota DPRD tidak melengkapi kekurangan berkas persyaratan pada saat verifikasi.